



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

KKP
2025

panganbiru

08
MARET 2025

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

LAPORAN KINERJA

Triwulan II

20
25



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat, sekaligus perwujudan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Disusun secara objektif, LKj ini diharapkan menjadi sarana evaluasi yang efektif sekaligus pendorong untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) dan Logical Framework sebagai kerangka strategis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Fokus pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025 mencakup lima bidang utama:

1. Pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan;
2. Operasi kapal pengawas dan pesawat patroli;
3. Penyiapan logistik armada pengawasan;
4. Pengawakan armada pengawasan;
5. Pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan;

Kita patut bersyukur, karena berbagai indikator kinerja strategis berhasil dicapai secara optimal, khususnya dalam mendukung kinerja Eselon I serta prioritas kementerian. Hal ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran, baik di pusat maupun di lapangan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan hari ini adalah hasil dari kerja keras kolektif, dan tantangan ke depan memerlukan komitmen yang lebih besar. Oleh karena itu, laporan ini juga kami posisikan sebagai dasar refleksi dan rujukan dalam proses perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat POA. Semoga, laporan ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam mendorong terciptanya birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, 18 Juli 2025

Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umum, S.St.Pi, MM



TIM PENYUSUN

PENANGGUNGJAWAB

DIREKTUR PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

KOORDINATOR PELAPORAN DIREKTORAT POA

- 1. Bayu Khrisna Adrianto, S.St.Pi**
- 2. Ikrom Bungsu, S.Pi**
- 3. Vandra Anggriawan, SH**
- 4. Hamzah Abdulloh, A.Md**

KONTRIBUTOR PELAPORAN DIREKTORAT POA

- 1. Davianda Bagus Hendaru, ST**
- 2. Zuleha Ernas, S.Si, M.Si**
- 3. Noval Reza Jaya, A.Md**
- 4. Wiwin Herwina, A.Md**
- 5. Rachmat Sofyan, S.St.Pi**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
Tim Penyusun	4
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
Daftar Lampiran	8
Ringkasan Eksekutif	9
 BAB I	 13
Pendahuluan	13
Latar Belakang	14
Maksud dan Tujuan	15
Isu Strategis Tahun 2025-2029	16
Tugas dan Fungsi Direktorat POA	17
Sistematika Penyajian	19
 BAB II	 20
Perencanaan Kinerja	20
Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2020 - 2024	21
Perjanjian Kinerja Dit. POA	24
Alokasi Anggaran	27
 BAB III	 28
Akuntabilitas Kinerja	28
Pengukuran Capaian Kinerja	29
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	31
Realisasi Anggaran	74
 BAB IV	 77
Penutup	77
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	78
Lampiran	79

Daftar Tabel

	10
Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW II 2024	33
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW II Tahun 2025	34
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-2 TW II Tahun 2025	35
Tabel 4. Komponen Perhitungan IKU 2	35
Tabel 5. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2025	36
Tabel 6. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-Juni 2025	39
Tabel 7. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Juni 2025	40
Tabel 8.. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW II Tahun 2025	42
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW II Tahun 2025	43
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW II Tahun 2025	46
Tabel 11. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW II Tahun 2025	47
Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW II Tahun 2025	48
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW II Tahun 2025	48
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW II Tahun 2025	50
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW II Tahun 2025	51
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW II Tahun 2025	52
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW II Tahun 2025	53
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW II Tahun 2025	54
Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKI Pada Tahun 2025	55
Tabel 20. Target dan realisasi IKU-12 periode Tahun 2025	56
Tabel 21. Rincian Pembangunan Prasarana di UPT 56	57
Tabel 22. Target dan realisasi IKU-13 periode TW II Tahun 2025	58
Tabel 23. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2025	59
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode TW II Tahun 2025	61
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW II Tahun 2025	62
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW II Tahun 2025	63
Tabel 27. Target dan realisasi IKU 18 periode TW II Tahun 2025	64
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 19 periode TW II Tahun 2025	65
Tabel 30. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW II Tahun 2025	67
Tabel 31. Target dan realisasi IKU 21 periode TW II Tahun 2025	68
Tabel 32. Target dan realisasi IKU 22 periode TW II Tahun 2025	71
Tabel 33. Target dan realisasi IKU 23 periode TW II Tahun 2025	72
Tabel 34. Target dan realisasi IKU-24 periode TW II Tahun 2025	73
Tabel 35. Target dan realisasi IKU-24 periode TW II Tahun 2025	74
Tabel 36. Target dan realisasi IKU-26 periode TW II Tahun 2025	
Tabel 37. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW II Tahun 2025	

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA	17
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2025	29
Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	32
Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan	41
Gambar 6 Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli	44
Gambar 7 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas	47
Gambar 8. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Hiu Macan Tutul 02	49



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	80
Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli	83
Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	87



Ringkasan Eksekutif

Sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini merefleksikan komitmen Direktorat POA terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Pohon Kinerja Direktorat POA, Rincian Target Kinerja, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menetapkan lima sasaran kegiatan strategis yang diturunkan ke dalam 20 indikator kinerja sebagai tolok ukur pelaksanaan program dan aktivitas operasional. Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja Direktorat POA menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi mencapai 107,51% dari target yang ditetapkan.

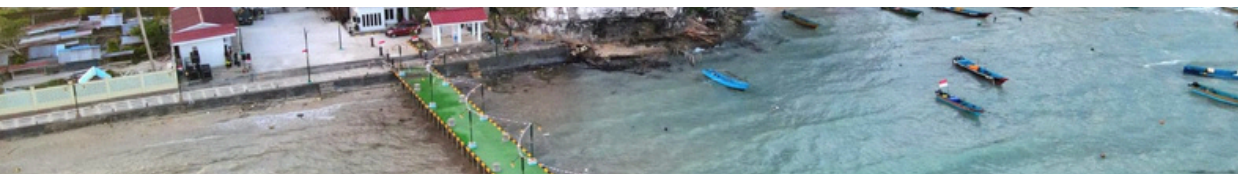
Dalam aspek pelaksanaan anggaran, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah merealisasikan 10 Rincian Output (RO) sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP Tahun Anggaran 2025.

Pagu anggaran Direktorat POA ditetapkan sebesar Rp259.564.477.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp54.059.940.000,00 (lima puluh empat miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), atau sebesar 20,83% dari total pagu yang tersedia.

Dalam pelaksanaan anggaran, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) berpedoman pada prinsip budget follow program secara efektif dan efisien, yang berarti setiap alokasi anggaran harus secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat.

Guna mendorong peningkatan kinerja organisasi dan memastikan tercapainya setiap indikator sesuai target yang telah ditetapkan, Direktorat POA secara konsisten melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala. Melalui mekanisme ini, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga langkah tindak lanjut dan upaya mitigasi dapat disiapkan secara tepat dan terukur.

Ringkasan realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW II Tahun 2025 ditabulasikan pada Tabel berikut:



Tabel 1. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja
Lingkup Direktorat POA periode Triwulan II 2025

Sadaran / Indokator Kinerja		Perhitungan	TARGET TAHUNAN	TW II		
				T	R	%
SK.0 3	Terselenggaranyya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi				112,86	
IKSK.0 3.1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	Rata - Rata	100	100	100	100
IKSK.0 3.2	Indeks pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)	Nilai Posisi Akhir	82	40	48,33	120
IKSK.0 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	Rata - rata	82	82	95,2	116,1
IKSK.0 3.4	Persentasi penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	Nilai Posisi Akhir	100	0	100	120
SK.0 4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif				104,78	
IKSK.0 4.1	Indeks Operasi Kapal Pengawas (indeks)	Nilai Posisi Akhir	92	0		
IKSK.0 4.2	Indeks Operasi Pesawat Patroli (indeks)	Nilai Posisi Akhir	95	91	98,24	108

Sadaran / Indokator Kinerja		Perhitungan	TARGET TAHUNAN	TW II		
				T	R	%
IKSK.0 4.3	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	Rata - rata	100	100	100	100
SK.0 5	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan				104,71	
IKSK.0 5.3	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (nilai)	Nilai posisi akhir	82	35	36,65	104,7
SK.0 6	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam perawatan sumber				106,75	
IKSK.0 6.2	Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Direktorat POA (Indeks)	Nilai posisi akhir	81	74	85,37	115,4
IKSK.0 6.4	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	Rata - rata	100	100	100	100
IKSK.0 6.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Rata - rata	95	95	100	105,3

BAB I

PENDAHULUAN



Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Latar Belakang



Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan, pemerintah memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ini.

Seiring penguatan tata kelola, pilar pengawasan kini semakin kokoh dengan kewenangan yang mencakup pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Dengan cakupan wewenang yang komprehensif tersebut, sistem pengawasan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak lepas dari sinergi dan kinerja optimal berbagai direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Di antara jajaran tersebut, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menempati posisi yang sangat strategis. Dengan mandat besar mencakup penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, hingga pengoperasian armada laut dan udara serta pemeliharaan pusat kendali, peran Direktorat POA menjadi poros penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.

Untuk menjalankan tugas besar tersebut secara andal, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja yang komprehensif. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi menyeluruh terhadap hasil kerja yang dicapai. Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, Direktorat POA juga diwajibkan untuk menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran atas hasilnya

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Dokumen ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja selama periode berjalan, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif yang berharga sebagai bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.





Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan II Tahun 2025 disusun dengan tujuan yaitu:



Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.



Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.



Tantangan Pengawasan Tahun 2025



Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat POA dalam pengendalian operasi armada, antara lain:

1. Praktik IUU fishing yang masih terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali diikuti dengan aktifitas perbudakan (slavery) dan perdagangan orang (people smuggling) diperlukan koordinasi dan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla).

2. Terbatasnya jumlah hari operasi Kapal Pengawas pada tahun 2025 menjadi tantangan signifikan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan target rata-rata hanya 28 hari operasi per kapal per tahun, intensitas dan cakupan patroli menjadi sangat terbatas, sehingga menurunkan efektivitas penegakan hukum di laut. Kondisi ini jelas tidak ideal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang lebih kolaboratif dan inovatif agar operasi pengawasan tetap optimal di tengah keterbatasan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan baik berupa armada operasi (kapal pengawas dan speedboat) maupun prasarana penunjang operasi pengawasan SDKP masih jauh dari kondisi ideal. Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern.

4. Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.



Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 1 (satu) orang Kasubdit Operasi Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli, 1 (satu) orang Kasubbag Tata Usaha, 4 (empat) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen KP, (2) Pengawakan Armada Pengawasan (3) Penyediaan Logistik Armada Pengawasan, (4) Ketua Tim Kerja Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA



Adapun Direktorat Pengendalian Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- c) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.



Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2025 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2025- 2029 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2025.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2025 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

Perencanaan Kinerja

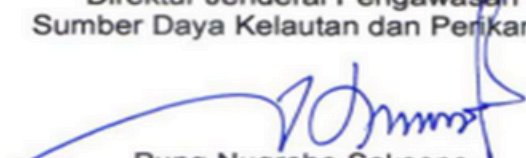
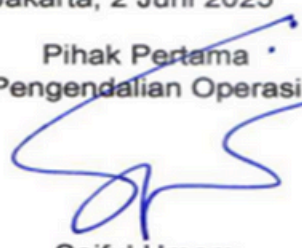


Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Perjanjian Kinerja Dit. POA

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2025, dibuat dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat POA Tahun 2025

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Saiful Umam Jabatan : Direktur Pengendalian Operasi Armada Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Pung Nugroho Saksono Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  Pung Nugroho Saksono	Jakarta, 2 Juni 2025 Pihak Pertama Direktur Pengendalian Operasi Armada  Saiful Umam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	2	Persentase cakupan dan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		3	Indeks pengelolaan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		4	Indeks kepuasan masyarakat penggunaan layanan sistem pemantauan kapal perikanan (indeks)	82
		5	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		8	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100
		9	Indeks kesiapan awak kapal pengawas (indeks)	80
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	10	Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (indeks)	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		11	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengasan SDKP (nilai)	82
5	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95
		13	Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	87
		14	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88
		15	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		17	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kinerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1
		19	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

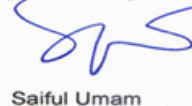
NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	249.142.299.000
SK 1.1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	
SK 1.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
SK 1.5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Total Anggaran		249.142.299.000

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada


Saiful Umam



ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Output anggaran Direktorat POA Tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN (000)
2350. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana			
1	RCG. 001. Armada Pengawasan	12 Unit	37,105,207
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas	31 Hari Operasi	176,070,270
3	QHD. 002. Operasi Pesawat Patroli	140 Hari Operasi	40,000,000
4	FBA. 001. Pemerintah	25 Pemerintah Daerah	547,000
5	AFA. 001. NSPK bidang Operasi	1 NSPK	220,000
6	ABW. 001. Rekomendasi Kebijakan Bidang	1 Rekomendasi	300,000
2352. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
7	RDS. 001. Sistem Pemantauan	1 Unit	3,811,000
8	ACA. 001 Surat Keterangan	4000 Produk	1,511,000
TOTAL ANGGARAN			259.564.477



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Pengukuran Capaian Kinerja



Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA TW II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 107,51% dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna HIJAU dengan kategori BAIK. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	T : 100	R : 100
	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan informasi Itjen SDKP	T : 40	R : 48,33
	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan	T : 82	R : 95,20
	Persentase penyelesai rencana NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	T : 100	R : 100
	Indeks operasi pesawat patroli	T : 91	R : 98,24
	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	T : 100	R : 100
	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	T : 35	R : 36,65
	Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Direktorat POA	T : 81	R : 85,37
	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	T : 100	R : 100
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	T : 95	R : 100

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA SOSIALISASI PENYADARTAHUAN MASYAKARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA EFEKTIF



1. Tingkat Kualitas Pemahaman Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja “Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan” bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta peserta sosialisasi khususnya peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Capaian Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test) yang peserta Bimtek berasal dari stakeholder atau para pemilik kapal perikanan.

Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat realisasi pada indikator tersebut, pengukuran akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2025. Selain itu terdapat penyesuaian target yang semula berjumlah 4 (empat) menjadi 1 (satu) kegiatan. Hal ini sehubungan alokasi anggaran yang mendukung kegiatan dimaksud termasuk yang di efisiensi.

Dalam memastikan keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan (Direktur POA) dalam memastikan kegiatan penyadartahuan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terlaksana dengan baik;
2. Selain itu, aspek perencanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan menjadi salah satu aspek yang krusial dalam memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 ditetapkan sebesar Rp1.511.000.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta rupiah). Anggaran ini diarahkan untuk memastikan seluruh kegiatan yang mendukung IKU 1 dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.



SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PEMANTAUAN SDKP YANG AKURAT DAN TERINTEGRASI

2. Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI

Indikator Kinerja “Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI” bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kegiatan yang dipantau antara lain: Aktivitas kapal perikanan berizin pusat WPP NRI, Aktivitas kapal di kawasan konservasi, Kejadian pencemaran perairan, Pemanfaatan ruang laut dan Aktivitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi. Direktorat POA memastikan Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan antara lain: a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) Automatic Identification System (AIS), c) Citra Satelit, d) Air Surveillance (foto udara) dan e) SMS/WA Gateway. Sekurang kurangnya dalam sebulan terpantau dengan salah satu kegiatan pemanfaatan SDKP menggunakan salah satu teknologi pemantauan pada WPP NRI. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Triwulan II Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-3 TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 3 pada TW II dapat dicapai secara maksimal. Capaian pada periode triwulan II tahun 2025 sama dengan capaian pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 100%, sehingga target dapat tercapai sepenuhnya. Adapun capaian dimaksud diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:



Formulasi perhitungan capaian Cakupan WPPNRI

Formula:

$$x = (x1/x2) \cdot 100\%$$

Keterangan:

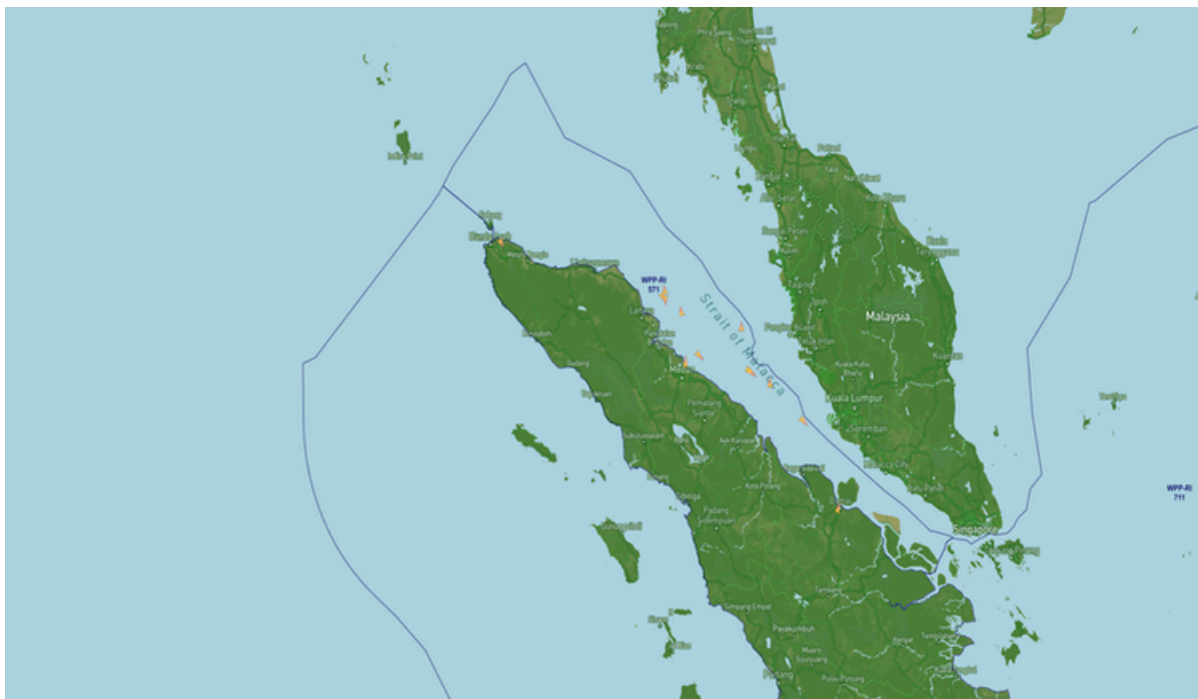
x: Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)

x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP

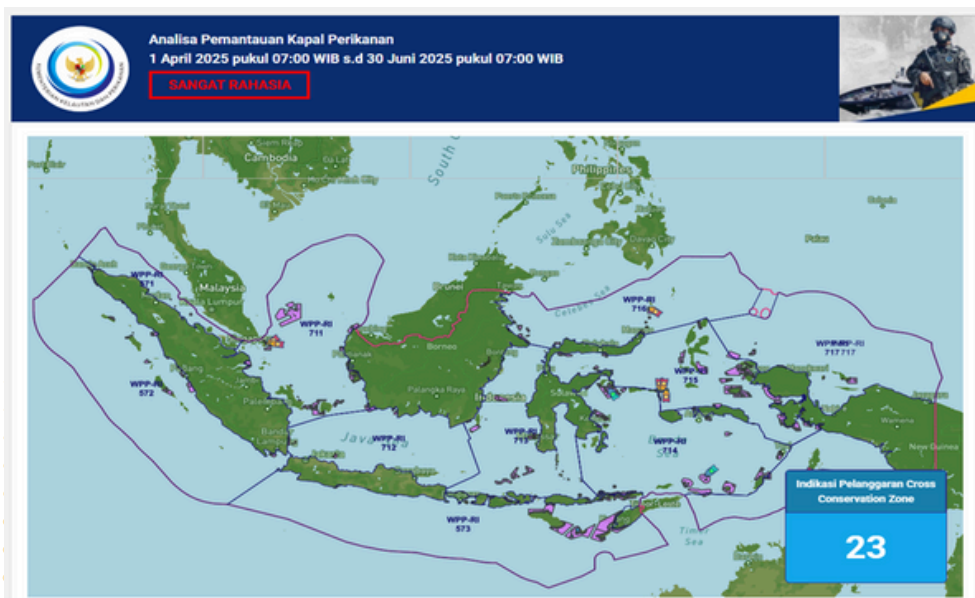
x2: Jumlah WPP NRI

	X1 =	11 WPPNRI	
	X2 =	11 WPPNRI	
Capaian	TW II	=	(11/11)x 100% = 100%

Gambar 2 Ilustrasi Pemantauan menggunakan SPKP periode Triwulan II 2025



Gambar 3 Ilustrasi Pemantauan menggunakan AIS periode Triwulan II 2025



Tabel 4. Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) Triwulan II 2025

Wilayah WPPNRI	Bulan			Keterangan
	April	Mei	Juni	
WPP NRI 571	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 572	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 573	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 711	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 712	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 713	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 714	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 715	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 716	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 717	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 718	✓	✓	✓	Terpenuhi

Tabel 5. Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Automatic Identification System (AIS)

Wilayah WPPNRI	Bulan			Keterangan
	April	Mei	Juni	
WPP NRI 571	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 572	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 573	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 711	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 712	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 713	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 714	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 715	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 716	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 717	✓	✓	✓	Terpenuhi
WPP NRI 718	✓	✓	✓	Terpenuhi

3. Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)” ditetapkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan operasi pengawasan. Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan akuntabilitas data hasil pemantauan serta analisis intelijen yang diberikan kepada para pemangku kepentingan.

Analisis yang disusun bersumber dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Data dan informasi ini menjadi dasar pertimbangan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pengawasan. Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU-3 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	-	-	-	-	-	-	40	50	125	40,00	48,33	120,83	-	-	-

Pada Triwulan II, target IKU 3 berhasil dilampaui. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan penurunan sebesar 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya permintaan data untuk mendukung operasi kapal pengawas dan air surveillance pada bulan Februari 2025. Hal tersebut berdampak pada capaian Triwulan II karena perhitungan IKU yang bersifat kumulatif dari bulan-bulan sebelumnya. Adapun indeks 48,33 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6. Komponen Perhitungan IKU 3

No	Indikator	Bulan						Bobot	Perhitungan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	40	20
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	20	10
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	20	10
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	0	1	1	1	1	20	8,33
Indeks									48,33

Berdasarkan tabel 6 diatas, angka 1 pada capaian bulanan tersebut menunjukkan tercapainya pemenuhan data realisasi perkomponen pada IKU 4. Sedangkan angka 0 menunjukkan tidak terpenuhi data realisasi perkomponen pada IKU 4.



Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Air Surveillance.

1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal- kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan berupa lembar "Indikasi Pelanggaran" dan diberikan memo penyampaian setiap harinya kepada UPT terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Untuk diketahui, Selama periode Triwulan II Tahun 2025, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 1.555 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2025

INDIKASI PELANGGARAN SPKP								TOTAL
Bulan	DPI	DPI (laut lepas)	Jalur Penangkapan	Pelabuhan Pangkal/ Muat	Poaching	Tanpa SIPI/SIK PI	Transshipment	
Jan	129	1	182	45	75	0	4	436
Feb	100	4	179	44	22	0	7	356
Mar	52	2	179	29	3	1	0	266
Apr	78	0	97	6	8	1	5	195
Mei	53	3	106	4	4	0	0	170
Juni	29	1	73	14	14	0	1	132
Total	441	11	816	142	126	2	17	1555

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II Tahun 2025 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 30 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam berikut:

Tabel 8. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan April 2025

No	Nama Kawasan	Jumlah
1	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan	6
2	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau	4
Total		10

Tabel 9. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Mei 2025

No	Nama Kawasan	Jumlah
1	Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa Dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara	4
2	Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Maluku	11
Total		15

Tabel 10. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Juni 2025

No	Nama Kawasan	Jumlah
1	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan	1
2	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Sula Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Maluku Utara	2
3	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Sulawesi Utara	1
4	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tapanuli Tengah Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Sumatera Utara	1
Total		5

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, diatur bahwa kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing hanya diperbolehkan memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebanyak maksimal 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemantauan terhadap aktivitas kapal pengangkut ikan hidup yang tercatat aktif selama periode Januari hingga Juni 2025.

Tabel 11. Jumlah Pemantauan Kapal Pengangkut Ikan Hidup s.d bulan Juni 2025

No	Bulan	Jumlah Kapal
1	Januari	37 Kapal
2	Februari	41 Kapal
3	Maret	39 Kapal
4	April	35 Kapal
5	Mei	36 Kapal
6	Juni	37 Kapal

4. Data untuk Operasi Kapal Pengawas / Air Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap periode pemantauan.

Tabel 12 Data Sebaran Kapal Perikanan sebagai Bahan Operasi s.d bulan Juni 2025

No	Bulan	Jenis Operasi	Tanggal	Wilayah Operasi	Jumlah Dokumen	Akumulasi
1	Januari	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	26 Januari 2025	11 WPP NRI	1	1
2	Februari	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	-	-	0	1
3	Maret	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	20 Maret 2025	WPP NRI 711	1	2
4	April	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	8 April 2025	WPP NRI 571, 711, 712	2	5
			14 April 2025	WPP NRI 573, 714	-	-
			15 April 2025	WPP NRI 716, 717	-	-

No	Bulan	Jenis Operasi	Tanggal	Wilayah Operasi	Jumlah Dokumen	Akumulasi
			28 April 2025	WPP NRI 711, 718	-	-
		Operasi pengawasan oleh UPT	23 April 2025	WPP NRI 714, 715	-	-
5	Mei	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	6 Mei 2025	WPP NRI 573, 713	2	8
			7 Mei 2025	WPP NRI 714, 716, 717	-	-
			8 Mei 2025	WPP NRI 573, 712	-	-
			15 Mei 2025	WPP NRI 711, 712, 714, 718	-	-
			19 Mei 2025	WPP NRI 711	-	-
		Operasi pengawasan oleh UPT	6 Mei 2025	WPP NRI 712	-	-
6	Juni	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	3 Juni 2025	WPP NRI 572, 573, 715, 716	2	10
			19 Juni 2025	WPP NRI 715, 716, 717	-	-
			24 Juni 2025	WPP NRI 573, 711, 712, 714, 715	-	-

Keberhasilan pencapaian target IKU ini merupakan hasil dari terpenuhinya seluruh komponen pendukung serta pelaksanaan tugas secara optimal oleh Direktorat Pengelolaan Operasi Armada, khususnya Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kapal Pengawas. Kontribusi tersebut diperkuat oleh keterlibatan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, yang berperan penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta keberlanjutan capaian kinerja secara menyeluruh.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp1,280,385,000,00 dan sampai dengan TW II tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 355,006,266,00 atau 27,73% dari alokasi anggaran



4. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tentang kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuran indikator ini dilakukan melalui pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan formulir digital pada tools Survei Kepuasan (Aplikasi SUSAN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penilaian dari para pengguna SPKP diolah secara otomatis oleh sistem dalam Aplikasi SUSAN.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KKP untuk mempermudah pengambilan data responden dan perhitungan nilai SKM, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKM secara realtime.

Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari sejumlah indikator kuantitatif yang menjadi tolok ukur mutu layanan publik secara terukur dan objektif.

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen digital yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan penerbitan SKAT sekaligus dapat memantau kapal perikanan miliknya.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanannya dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	92,34	115,43	80	89,67	112,09	81	97,05	119,81	82	95,20	116,10	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 95,20 dari target sebesar 82 sehingga persentase capaian sebesar 116,10%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat selisih/depresiasi sebesar 3.71%. Sejak triwulan II tahun 2025 telah dilakukan inovasi pelayanan SPKP melalui aplikasi SALMON Kilat dimana penerbitan layanan SPKP semakin mudah dan cepat, namun perlu dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SALMON Kilat tersebut, sehingga perlu dilakukan publikasi terkait mekanisme dan panduan penggunaan SALMON Kilat.

Potret hasil survei kepuasan masyarakat periode TW II Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi SUSAN KKP sebagai berikut :

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
psdkp	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	2025	2	4.95	95.04	130

Gambar 5. Tangkapan Layar Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP TW II pada Aplikasi SUSAN KKP

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP serta peningkatan kinerja pada triwulan II 2025 dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan pelayanan SPKP sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar **Rp396,542,000,00 atau 6,99%** dari alokasi anggaran

2.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan SPKP;

3.

Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.



5. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Direktorat POA pada tahun 2025 telah menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) sebanyak 1 (satu) dokumen. NSPK yang disusun yaitu terkait pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi untuk indikator ini telah tercapai sebesar 100%, NSPK yang disusun untuk tahun 2025 adalah Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 39 tahun 2025 tentang Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Pemenuhan NSPK dimaksud telah memenuhi kaidah penyusunan NPSK di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. NSPK dimaksud telah sampaikan kepada Direktur Jenderal PSDKP berdasarkan memo dengan Nomor 1332/DJPSPDKP.3/TU.210/VI/2025, 24 Juni 2025. Keberhasilan pencapaian indikator dimaksud dipengaruhi beberapa beberapa hal sebagai berikut :



Tingginyakomitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi dibidang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaannorma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.



Penetapan target NSPK yang menjadiprioritas oleh DirekturPOA yang harus diselesaikan.



Gambar 6. Pembahasan rancangan Kepdirjen PSDKP tentang Manajemen Mutu

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar **Rp396,542,000,00** atau **6,99%** dari alokasi anggaran

6. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 4 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Objek Kelautan (Bobot 40%);

2. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%);

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%);

4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%).

Tabel 15. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)							87,6	96,19	109,8	70	95,12	135,88	-	-	-	-	-	-

Pengukuran capaian kinerja operasi kapal pengawas dijadwalkan pada Triwulan IV Tahun 2025, dengan target Indeks Kinerja sebesar 92. Penjadwalan ini mempertimbangkan keterbatasan anggaran operasi kapal pengawas yang sebagian besar bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), yang pelaksanaannya baru dapat dimulai pada Triwulan II 2025. Di sisi lain, banyak sarana pengawasan SDKP belum dapat beroperasi secara optimal akibat kendala anggaran.

Hingga akhir Triwulan II 2025, upaya yang dilakukan difokuskan pada pembaruan data capaian kegiatan operasi kapal pengawas secara berkala. Namun, penghitungan resmi kinerja ditunda hingga akhir tahun guna menjaga efektivitas evaluasi, mengingat dinamika kebijakan nasional yang memengaruhi alokasi anggaran, strategi operasi, serta proyeksi ketidakpastian pelaksanaan di lapangan.

Dengan kondisi tersebut, pengukuran kinerja menyeluruh baru akan dilakukan pada Triwulan IV 2025. Meskipun demikian, target dan spesifikasi kinerja yang telah ditetapkan tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan operasi. Diharapkan, pada Triwulan IV terdapat relaksasi anggaran yang memungkinkan percepatan dan optimalisasi pencapaian kinerja.



Gambar 8. Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) Kapal Ikan Asing oleh Kapal Pengawas



Adapun sampai dengan periode TW II Tahun 2025, Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri sebanyak 188 hari operasi yang melibatkan 10 unit Kapal Pengawas, dengan rata-rata hari operasi untuk setiap kapal pengawas adalah 21,7 hari. Selama periode ini, Kapal Pengawas berhasil memeriksa sebanyak 299 kapal (294 Kapal Ikan Indonesia/KII dan 5 Kapal Ikan Asing/KIA). Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 47 kapal (43 KII dan 4 KIA) berhasil ditangkap. Rincian capaian kinerja operasi kapal pengawas disajikan pada tabel 16.

Tabel 16. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW II Tahun 2025

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	8	22	0	22	9	0	9
2	KP. ORCA 02	31	30	0	30	0	0	0
3	KP. ORCA 03	14	1	2	3	0	2	2
4	KP. ORCA 04	37	45	1	46	3	1	4
5	KP. ORCA 05	21	76	0	76	26	0	26
6	KP. ORCA 06	25	30	0	30	0	0	0
7	KP. BARAKUDA 01	6	0	0	0	0	0	0
8	KP. BARAKUDA 02	1	3	0	3	1	0	1
11	KP. PAUS 01	25	79	2	81	2	1	3
12	KP. AKAR BAHAR 01	20	8	0	8	2	0	2
JUMLAH TOTAL		188	294	5	299	43	4	47

Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 sebesar Rp176.070.270.000,00. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp35.048.926.739,00 atau setara dengan 19,91% dari total pagu.

Dari keseluruhan pagu anggaran tersebut, masih terdapat sebagian anggaran yang diblokir, antara lain anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6.233.332.000,00 yang masih menunggu persetujuan atas penetapan maksimum pencairan PNBP tahap I Tahun Anggaran 2025. Selain itu, terdapat pula pemblokiran anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang sama, yakni Rp6.233.332.000,00, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pagu efektif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian IKU 8 adalah sebesar Rp101.408.497.000,00 atau 34,56% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

7. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan operasional Pesawat Patroli dalam rangka mewujudkan Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang di kuantitatifkan, beberapa komponen yang mendukung indikator ini antara lain:

	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa		Persentase Coverage Area Pengawasan
	Persentase Capaian Hari Operasi		Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan
	Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi		Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717)
	Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi		Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional
	Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan)		

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 20212			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	-	-	-	93	98,53	106	91	100	109,9	91	98,24	107,95	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 17, Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli hingga Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian yang telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi indeks kinerja hingga periode ini mencapai 98,24, dari target sebesar 91, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 107,95%.



Gambar 9. Dokumentasi Kapal Perikanan dan Objek SDK yang Dipantau Oleh Operasi Pesawat Patroli

Capaian positif ini mengindikasikan bahwa target operasional pesawat patroli telah tercapai secara maksimal. Keberhasilan ini didukung oleh tercapainya target-target spesifik dalam operasi patroli, meliputi:

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Jumlah kapal perikanan yang dipantau sesuai target.	Luas area pengawasan (coverage area) yang sesuai target	Jumlah hari operasi yang terealisasi sesuai target.	Tindak lanjut yang efektif terhadap target operasi yang diberikan.	Jumlah kapal yang berhasil divalidasi sesuai target	Pemberian dukungan pengawasan kawasan konservasi, pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang optimal

Keberhasilan melampaui target pada Triwulan II Tahun 2025 ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang intensif dan berkelanjutan yang dilakukan secara langsung oleh Direktur Pengendalian Operasi Armada selama periode bulanan. Pembinaan ini berperan penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan efektif dan efisien, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Selama periode operasi TW II Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) periode operasi dengan total jumlah hari operasi sebanyak 66 hari operasi. Adapun hasil capaian operasi Pesawat Patroli sampai dengan TW II adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Wilayah dan Hari Operasi sd. Triwulan II 2025

No	Periode	WPP	Hari Ops
1	Periode I	711, 712, 713, 573, 572	7
2	Periode I-A	711, 712	6
3	Periode II	712	5
4	Periode II-A	716, 717, 715	10
5	Periode III	572, 711, 573	4
6	Periode III-A	712, 713, 573	4
7	Periode IV	712	1
8	Periode IV-A	711, 712, 573	3
9	Periode V	712, 713, 715, 716	3
10	Periode V-A	716, 717, 715, 712	5
11	Periode V-B	712, 711	7
12	Periode VI	573, 717, 716, 712	11

Dalam pelaksanaan operasi Kapal Pengawas Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Penyusunan rencana operasi pesawat patroli perlu memperhatikan wilayah dan jam operasi pesawat patroli untuk mencapai coverage area yang ditetapkan karena selain memprioritaskan wilayah dengan potensi kerawanan tinggi, operasi pesawat pada WPPNRI yang lain juga menjadi faktor pengukuran terkait cakupan/coverage area;
2. Perlunya memperhatikan pergerakan pesawat patroli dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi sehingga meningkatkan capaian kinerja operasi;
3. Pemanfaatan data dan informasi dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (Command Center), serta informasi dari sumber yang relevan yang mendukung operasi pengawasan SDKP melalui udara.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp40.000.000.000,00 (Nilai Blokir dan Efisiensi Rp. 17.300.204.000,-) dan sampai dengan TW II tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 21.899.167.805,- atau 97,07% dari alokasi anggaran.

8. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas dalam mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik dimaksud meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, sementara itu logistik personel terdiri dari : Bahan Makanan, Air Tawar, Alat-alat Pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Capaian TW II tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2023 maka capaian realisasi relatif sama, namun untuk alat-alat pelayanan pada TW II bulan Juni tidak dapat dilakukan sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran Dit POA, sehingga mengakibatkan hilangnya anggaran untuk pemenuhan alat2 pelayanan. untuk itu pada bulan Maret tidak terdapat pengajuan dan realisasi anggaran. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2022-2025. Adapun rincian capaian setiap komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW II Tahun 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
Total Nilai		100	100	100

Beberapa kegiatan penyediaan logistik antara lain :

1. Pelaksanaan pengisian bahan bakar sesuai dengan jadwal pengajuan BBM kapal pengawas, melaksanakan pemenuhan bahan makanan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat - alat pelayanan dan pelaporan senjata api tepat waktu sesuai dengan periode triwulanan yang telah di tetapkan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kapal pengawas terkait pelaksana pekerjaan secara berkala terkait pengisian bbm melalui aplikasi SIGOTIK (Online maupun secara manual) dan juga monev terkait pelaksanaan pengadaan bahan makan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat-alat pelayanan dan pemenuhan senjata api
3. Pelaksanaan pendampingan dan koordinasi dengan pihak pertamina baik di pusat maupun di UPT PSDKP
4. Penyusunan dokumen manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan Logistik.



Gambar 10. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Orca 01 dan Pemenuhan Minyak Pelumas KP. Paus 01 (dokumentasi disesuaikan)

Keberhasilan pencapaian target kinerja sampai dengan periode triwulan II 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Optimalisasi penggunaan listrik darat untuk mengurangi konsumsi BBM Kapal Pengawas, sehingga diharapkan dapat menambah hari operasi kapal pengawas.
- Penyusunan peta risiko dan memdomani secara ketat dalam rangka memastikan setiap kebutuhan penyediaan logistik dapat terpenuhi secara maksimal
- Optimalisasi penggunaan Sistem Pengendalian Logistik (SIGOTIK) untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pencatatan setiap penggunaan maupun distribusi logistik kapal pengawas.

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp176.070.270.000,00 dan sampai dengan TW II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp35.048.926.739,00 atau 19,91% dari total pagu. Dari pagu total anggaran tersebut

terdapat anggaran yang masih diblokir yaitu anggaran yang bersumber dari dana PNBPN sebesar Rp.68.428.441.000,00 yang masih menunggu persetujuan penetapan maksimum pencairan PNBPN tahap I TA 2025 dan blokir anggaran perjalanan dinas atas dasar kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp6.233.332.000,00 sehingga pagu efektif untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini Rp101.408.497.000,00 dengan persentase 34,56%.

9. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas bertujuan untuk mengukur seberapa siap Awak Kapal Pengawas (AKP) (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, keahlian pelaut, keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Hingga akhir Juni 2025, belum terdapat realisasi untuk indikator kinerja ini. Namun demikian, pencapaian kinerja direncanakan akan direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Walau realisasi anggaran belum berjalan, sejumlah langkah strategis telah diambil sebagai bagian dari upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya dalam aspek pemenuhan kompetensi. Kegiatan pemenuhan kompetensi ini beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: Fasilitasi Tugas Belajar AKP; Fasilitasi Diklat Pengawas Perikanan bagi AKP; Berperan aktif dalam pembahasan Program Ikatan Dinas Bagi Taruna di Satuan Pendidik KP. Lingkup KKP untuk menjadi Awak Kapal Pengawas; Tahap perencanaan Medical Check Up (MCU) bagi AKP Tahun 2025; dan Persiapan penyelenggaraan pelatihan menembak bagi AKP.



Gambar. 11 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis AKP Triwulan II 2025

10. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran (indeks) yang digunakan untuk menilai kualitas kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan yang telah dilakukan sehingga kapal pengawas dapat dinyatakan “Laik Operasi”. Indeks kualitas dimaksud di atas didapatkan berdasarkan laporan hasil survey penilaian kondisi teknis kapal pengawas yang dilakukan oleh surveyor dari SBU Marine Service PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang menyatakan sebuah kapal pengawas yang telah disurvei masuk dalam kategori “Laik Operasi” atau “Tidak Laik Operasi”.

Adapun capaian IKU Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Target dan realisasi IKU 10 pada periode TW II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sampai dengan periode Triwulan II 2025 indikator tersebut belum ada capaian, hal ini dikarenakan kegiatan survey penilaian kondisi teknis kapal pengawas oleh BKI direncanakan baru akan dilaksanakan pada periode Triwulan ke IV atau pada akhir periode Semester II tahun 2025. Meskipun demikian terbuka kemungkinan indikator tersebut akan dapat diukur dan tercapai sebagian pada Triwulan ke III apabila survey penilaian kondisi teknis kapal pengawas dapat dilaksanakan lebih cepat menyesuaikan dengan jadwal pemeliharaan dan perawatan tahunan kapal pengawas.

Survey penilaian kondisi teknis oleh BKI terhadap kapal pengawas yang berada dibawah kendali Direktorat Pengendalian Operasi Armada dilakukan dengan menggunakan metode Condition Assessment Programme (CAP), yaitu sebuah program penilaian kondisi kapal yang meliputi beberapa aspek seperti aspek konstruksi, permesinan, propulsi dan sistem pendukung lainnya dimana hasil penilaian kondisi kapal pengawas tersebut akan disajikan dalam format CAP Grading yang terbagi dalam 4 kategori dengan persentase nilai teknis yang berbeda-beda, dimana persentase nilai teknis tertinggi yaitu 95 - 100% dengan predikat "Very Good".

Dalam rangka mencapai target IKU 11, terdapat beberapa hal yang sedang dan akan dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya yaitu:



1. Menyusun jadwal perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat secara efisien, efektif, dan berkesinambungan.



2. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas dengan pelaksana pekerjaan secara berkala



3. Menyusun dokumen manajemen risiko, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan.



4. Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala untuk melakukan pemantauan hasil perawatan dan memvalidasi detail pekerjaan di lapangan.



5. Senantiasa berkonsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait akuntabilitas pelaksanaan dan monitoring kegiatan perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini sebesar Rp.304.000.000,00 dan sampai dengan akhir TW II tahun 2025 belum ada realisasi.

11. Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah indikator untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP, supervisi dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas di UPT.

Hasil pelaksanaan supervisi akan dituangkan dalam sebuah laporan hasil supervisi yang memuat informasi tentang evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas yang telah diselesaikan oleh UPT dengan pedoman pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas dan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan SDKP di UPT. Metode pelaksanaan supervisi dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi kapal/UPT atau secara tidak langsung/daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti telepon, aplikasi chatting WhatsApp ataupun melalui aplikasi teleconference seperti Zoom Meeting dan Google Meet.

Pada tahun 2025 Sarana Pengawasan SDKP yang akan dinilai/disupervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatannya yaitu sebanyak 90 unit Kapal Pengawas yang meliputi Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 7 unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit, dan Kapal Pengawas Kelas V (tipe Speed Boat, RHIB, dan Rubber Boat) sebanyak 66 unit.

Capaian IKU 11 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan sampai dengan TW II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 23. Target dan realisasi IKU 11 pada periode TW II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	30	34,1	113,67	35	36,6	104,71	-	-

Sampai dengan periode TW II tahun 2025, IKU 11 telah telah berhasil tercapai sebesar 36,6 dengan persentase capaian sebesar 104,71% atau melebihi target yang telah ditetapkan pada Triwulan II yaitu sebesar 35. Dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2024, terdapat kenaikan capaian sebesar 2,5%.

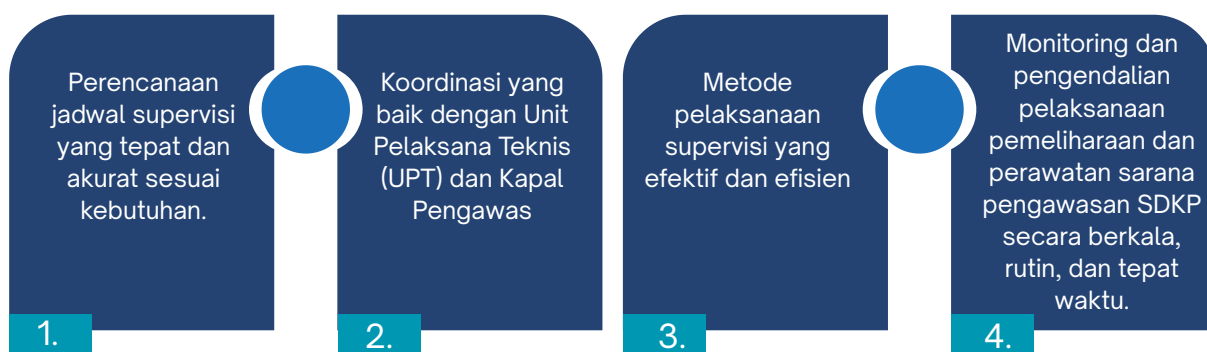
Pencapaian nilai indikator kinerja ini didapatkan dari jumlah dokumen laporan dan nilai bobot pelaksanaan supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan pada 17 unit kapal pengawas di UPT lingkup Ditjen PSDKP dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 24. Daftar kapal pengawas yang disupervisi pada TW II tahun 2025

No	Kapal Pengawas	UPT Penempatan	Nilai Bobot
1.	Hiu Macan Tutul 01	Pangkalan PSDKP Bitung	3,1
2.	Hiu Macan Tutul 02	Pangkalan PSDKP Benoa	3,1
3.	Hiu 02	Pangkalan PSDKP Bitung	3,1
4.	Hiu 03	Pangkalan PSDKP Batam	3,1
5.	Hiu 04	Stasiun PSDKP Cilacap	3,1
6.	Hiu 05	Pangkalan PSDKP Bitung	3,1
7.	Hiu 06	Pangkalan PSDKP Jakarta	3,1
8.	Hiu 09	Pangkalan PSDKP Benoa	3,1
9.	Hiu 10	Pangkalan PSDKP Jakarta	3,1
10.	Hiu 12	Pangkalan PSDKP Lampulo	3,1
11.	Hiu 17	Pangkalan PSDKP Batam	3,1
12.	Napoleon 07	Pangkalan PSDKP Benoa	0,4
13.	Napoleon 12	Stasiun PSDKP Cilacap	0,4
14.	Napoleon 23	Stasiun PSDKP Cilacap	0,4
15.	Napoleon 33	Pangkalan PSDKP Benoa	0,4
16.	Napoleon 41	Stasiun PSDKP Cilacap	0,4
17.	Dolphin 028	Pangkalan PSDKP Benoa	0,4
Total			36,6

Sehubungan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait dengan efisiensi anggaran dan pembatasan penggunaan anggaran perjalanan dinas, maka supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP pada Triwulan II tahun 2025 lebih banyak dilakukan secara tidak langsung melalui panggilan telepon, WhatsApp ataupun melalui melalui aplikasi teleconference lainnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target realisasi IKU 11 antara lain sebagai berikut:





Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini yaitu sebesar Rp.245.700.000,00 dan sampai dengan akhir TW II tahun 2025 belum ada realisasi karena anggaran masih diblokir dalam rangka efisiensi.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

12. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

Berdasarkan target kinerja Realisasi Anggaran tahun 2025, Direktorat POA memasang target sebesar 95%. Namun demikian, secara prognosa diupayakan dapat mencapai hingga 99% dengan catatan seluruh blokir anggaran (efisiensi/blokir lainnya) dapat dikeluarkan dari pagu Direktorat POA.

- a)Memastikan proses pengajuan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan dengan cepat dan akuntabel;
- b)Memastikan kegiatan kontraktual terlaksana sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku;
- c)Meminimalisir Deviasi halaman IV DIPA.

Tabel 25. Target dan realisasi IKU 12 periode TW II Tahun 2025

[illegible]

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan dalam mempercepat setiap proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- Membuat rencana penarikan dana serta proyeksi penyerapan.

13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20 JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

ASN Struktural :
$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
ASN Fungsional :
$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatfungsional} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
ASN Staff:
$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	77	81.64	106	78	91.23	117	82	91.29	111.45	74,00	85,37	115,36	-	-

Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah berada dalam kategori Tinggi. Capaian ini mencerminkan kinerja positif dalam pemenuhan unsur-unsur pembentuk IP ASN, yang terdiri atas: kualifikasi (dengan bobot 25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), dan disiplin (5%).

Bila dibandingkan antara target dan realisasi pada periode tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat POA telah melampaui target yang ditetapkan. Target IP ASN untuk Triwulan II Tahun 2025 sebesar 74, berhasil direalisasikan pada angka indeks 85,37, atau setara dengan 115,26% dari target.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan sebesar 1,38% dimana capaian triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 89,89. Penurunan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dibanding capaian Semester I tahun sebelumnya disebabkan oleh capaian yang masih bersifat sementara karena evaluasi dilakukan pada semester 2. Selain itu, belum optimalnya pemutakhiran data Riwayat Diklat ASN turut memengaruhi hasil capaian tersebut. Upaya peningkatan nilai IP ASN dengan mengarahkan keikutsertaan pada E-Milea KKP dan mengadakan pelatihan teknis terkait lainnya dilakukan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun. Adapun tidak ada target akhir Renstra PSDKP 2020-2024

Capaian ini menunjukkan komitmen Direktorat POA dalam membangun tata kelola sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tuntutan organisasi. Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi landasan penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat secara berkelanjutan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP sebagai berikut:

Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Semester I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)	Kompetensi (bobot 40)	Kinerja (bobot 30)	Disiplin (bobot 5)	TOTAL	Keterangan
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	76	22.83	29.49	26.51	5	83.83	TINGGI
2	DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN	30	23.83	30.77	25.33	5	84.93	TINGGI
3	DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA	216	23.47	31.88	25.02	5	85.37	TINGGI
4	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN	39	23.46	29.25	26.28	4.9	83.89	TINGGI
5	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	39	24.36	29.03	26.03	5	84.42	TINGGI
6	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	33	23.64	30.13	25.3	5	84.07	TINGGI
7	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	69	22.97	28.05	25	5	81.03	TINGGI
8	PANGKALAN PSDKP BATAM	101	22.28	28.34	25	5	80.62	SEDANG
9	PANGKALAN PSDKP JAKARTA	101	22.03	31.19	24.95	5	83.17	TINGGI
10	PANGKALAN PSDKP BENOA	82	22.07	31.4	25	5	83.48	TINGGI
11	PANGKALAN PSDKP BITUNG	120	22.38	28.94	24.79	4.97	81.07	TINGGI
12	PANGKALAN PSDKP TUAL	88	22.84	27.99	25	5	80.83	SEDANG
13	STASIUN PSDKP CILACAP	89	21.57	31.06	25	5	82.63	TINGGI
14	STASIUN PSDKP BELAWAN	86	22.5	29.22	25	5	81.72	TINGGI
15	STASIUN PSDKP KUPANG	49	23.27	28.92	24.49	5	81.67	TINGGI
16	STASIUN PSDKP PONTIANAK	90	22.83	31.34	25	5	84.18	TINGGI
17	STASIUN PSDKP TARAKAN	47	22.34	33.72	25.11	5	86.16	TINGGI
18	STASIUN PSDKP TAHUNA	31	23.23	29.95	23.39	5	81.56	TINGGI
19	STASIUN PSDKP AMBON	65	23	33.9	25	5	86.9	TINGGI
20	STASIUN PSDKP BIAK	51	23.04	34.05	24.8	5	86.89	TINGGI

<https://ipasn.sdmao.id/>
15 Juli 2025

14. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar anggaran (input) atau kegiatan (output).

Dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja, Inspektorat Jenderal KKP melakukan penilaian terhadap Unit Eselon I, sementara Kementerian PANRB menilai di tingkat kementerian pusat dan daerah.

Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, yang mencakup empat aspek: perencanaan kinerja (30%), pengukuran (30%), pelaporan (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai ini menjadi indikator tingkat kemajuan implementasi SAKIP di lingkungan KKP.

Tabel 27. Target dan realisasi IKU 14 periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan II 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan III Tahun 2025.



Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kelengkapan data dukung SAKIP meliputi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi;
- b) Adanya inovasi yang digagas oleh unit kerja serta adanya indikator kinerja yang menjadi percontohan oleh unit kerja lain yang bersifat nasional;
- c) Konsistensi dari indikator kinerja tiap tahunnya dengan capaian kinerja minimal sama akan lebih baik lagi jika mengalami peningkatan.

15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
 - Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
 - Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
- 

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU 15 Periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW II Tahun 2025 telah berhasil dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2024, capaian relatif sama dengan persentase 100%.

Pada Direktorat POA terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang menjadi prioritas pengendalian berbasis Manajemen Risiko antara lain:

Tabel 29. Kegiatan prioritas pengendalian manajemen risiko

NO	RO	DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS
1	ABW	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2	ACA	Pelaksanaan Pelayanan Publik SKAT
3	AFA	Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria
4	BKB	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau
5	FBA	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada
6	QHD1	Operasi Kapal Pengawas
7	QHD1	Penggunaan Anggaran PNBPN
8	QHD2	Operasional Pesawat Patroli
9	RCG	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat
10	RDS	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
11	-	AKP PHLN

Berdasarkan hasil pengendalian kegiatan prioritas berbasis manajemen risiko pada Triwulan II Tahun 2025, seluruh rencana pengendalian terhadap 21 risiko yang melekat pada 10 kegiatan prioritas Direktorat POA telah terlaksana secara keseluruhan, dengan tingkat realisasi mencapai 100%. Persentase capaian IKU MR sampai dengan triwulan II 2025 sebagai berikut:

Tabel 29 Daftar Kegiatan yang dikendalikan berbasis Manajemen Risiko

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	3	3	100%
	Direktorat POA	21	21	100%
	Direktorat PSP	6	6	100%
	Direktorat PPSPDP	10	10	100%
	Direktorat PPSDK	6	6	100%
	Direktorat PP	13	13	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	17	17	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	14	14	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	23	23	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	30	30	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	23	23	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	13	13	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	11	11	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	14	14	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	6	6	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	16	16	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	7	7	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	5	5	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	8	8	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	11	11	100%
Total		257	257	100%

Sumber: Data rilis Setditjen PDKSP Surat Dinas Nomor: B.2332/PSDKP.1/OT.710/VII/2025, 15 Juli 2025

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Risiko yang rutin dilaksanakan lingkup Direktorat POA.

16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 30. Target dan realisasi IKU 16 periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	70	100	75	100	133,33	80	90,91	113.63	80	100	125	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah tercapai melampaui target yang ditetapkan dan apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2024 realisasi capaian terdapat kenaikan sebanyak (5%), tahun 2024 tercapai 113.63% sedangkan triwulan II 2025 tercapai 125%. Keberhasilan ini, dipengaruhi oleh komitmen pimpinan beserta jajaran dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan melakukan monitoring bertahap dan konsisten. Hasil capaian ini mengacu pada hasil perhitungan dan rilis data yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP melalui Surat Dinas nomor: B.2306/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2025, hal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2025. Tangkapan layar data hasil rilis Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP sebagai berikut:

Lampiran II Surat Dinas
 Nomor :B.2306/DJPSPDKP.1/TU.140/VII/2025
 Tanggal :10 Juli 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU

“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	58	58	100.00	0	0
2	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	1	1	100.00	0	-
4	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
5	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
8	Pangkalan PSDKP Batam	0	0	-	0	-
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	0	0	-	0	-
10	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
12	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Belawan	22	22	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 11. Data rekapitulasi Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat POA Periode Triwulan II 2025

17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat POA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Tabel 31. Target dan realisasi IKU 17 periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan II 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan dalam mengembangkan SDM Arsiparis Dit POA agar terciptanya Arsiparis yang dinamis.
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

18. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 32. Target dan realisasi IKU 18 periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan akhir Triwulan II 2025, belum ada capaian, pengukuran dilakukan pada triwulan IV 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya; dan
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.

19. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 33. Target dan realisasi IKU 19 periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%

Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sampai dengan akhir Triwulan II 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk mengawal dan memenuhi persyaratan agar Direktorat POA mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

20. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- ♦ Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- ♦ Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase Target nilai
- ♦ Satker Pusat minimal 21 yang akan diukur pada triwulan IV 2025

Tabel 34. Rincian target dan realisasi IKU 20 periode TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan II 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU) : Melakukan asistensi kepada untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat : Mencantumkan pada surat undangan agar peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R): Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih
- Upayakan Data Terkini (UPDATE) : Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) : Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.
- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) : Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik
- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) : Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) : Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) : Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.
- Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.
- Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green) : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, hingga Triwulan II Tahun 2025, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah melaksanakan 10 (sepuluh) Rincian Output (RO) Kegiatan Pengendalian Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan sesuai DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP Tahun 2025.

Direktorat POA mengelola pagu anggaran sebesar Rp259.564.477.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi hingga akhir Triwulan II mencapai Rp54.059.940.000,00 (lima puluh empat miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), atau sebesar 20,83% dari total pagu anggaran.

Tabel 35. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW II Tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	254,242,477,000	53,677,225,000	21,11
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	37,105,207,000	2,669,698,000	11,18
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	176,070,270,000	35,048,926,000	20,63
3	QHD. 002 Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	40,000,000,000	15,958,601	70,74
5	FBA. 001 Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547,000,000	-	-

6	AFA. 001. NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220,000,000	-	-
7	ABW. 001. Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300,000,000	-	-
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5,322,000,000	382,715,000	7,19
8	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3,811,000,000	355,006,000	27,72
9	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,511,000,000	27,709,000	6,99
TOTAL PAGU		259,564,477,000	54,059,940.000	20,83

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian Operasi Armada terus mengedepankan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. Hingga Triwulan II Tahun 2025, efisiensi kinerja Direktorat tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 107,51% (kategori Baik), meskipun realisasi anggaran baru mencapai 20,83% dari total pagu.

Capaian ini menunjukkan bahwa output dan hasil kerja yang signifikan mampu diraih dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah, sehingga menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan program yang cukup tinggi di lingkungan Direktorat POA.

Sebagai upaya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, Direktorat Pengendalian Operasi Armada menerapkan strategi operasi berbasis udara (airborne surveillance) untuk menghasilkan target operasi yang telah terverifikasi. Pola ini memungkinkan kapal pengawas bergerak langsung menuju sasaran di laut secara tepat waktu dan tepat lokasi. Strategi ini dikenal dengan pola intercept, yang terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal pengawas karena mengurangi waktu dan jarak pelayaran yang tidak produktif.

Selain itu, Direktorat POA juga mengoptimalkan efisiensi dalam pelaksanaan supervisi perawatan kapal pengawas di UPT PSDKP. Jika sebelumnya kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi, kini pelaksanaannya beralih menggunakan media rapat virtual atau video conference, tanpa mengurangi efektivitas pengawasan dan koordinasi teknis..

C. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2025 :

- **Aspek Operasi Armada**
Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), dan lain lain. Selain itu, pola operasi *integrated surveillance system* (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.
- **Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas**
Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.
- **Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP**



Pada tahun 2025, akan dilaksanakan penilaian kondisi sarana pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan, untuk itu Direktorat POA telah menyiapkan rencana pelaksanaan penilaian.

- **Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP**
Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.
 - **POA Virtual Class**
Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.
- 

BAB IV

Penutup



A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar 107,51% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp 54,059,940.000 (20,83%).
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2025 adalah sejumlah 20 indikator kinerja. Dari target 20 Indikator Kinerja tersebut, sejumlah 10 diukur pada Triwulan II 2025. Dari 10 IKU yang diukur, sebanyak 3 IKU tercapai 100% dan 6 IKU tercapai lebih dari 100%.
3. Pada TW II tahun 2025 terjadi depresiasi nilai kinerja organisasi sebesar 8,01% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan II tahun 2025, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada periode Triwulan III 2025. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja TW III tahun 2025, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan seluruh Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tercapai sesuai target yang ditetapkan khususnya untuk kinerja yang pengukurannya di akhir tahun	Melaksanakan rapat pengendalian indikator kinerja secara berkala melibatkan penanggungjawab kinerja pada level Subdit / Tim Kerja lingkup Direktorat POA
Memaksimalkan alokasi anggaran non blokir untuk menunjang kegiatan pengendalian operasi armada	Melaksanakan evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja Direktorat POA secara berkala



LAMPIRAN

Selasa, 22 Juli 2025

Download

- | Kode | Sasaran/Indikator Kinerja | Satuan | Polarisasi | Perhitungan | Target 2025 | Target Juni | Capaian Juni | % | Target s/d Juni | Capaian s/d Juni | % | Tgl Input |
|-----------|---|---------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------------|------------------|--------|-------------------|
| SK.01 | Terseleenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif | | | | | | | | | | | |
| IKSK.1 | Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan
Tambah Data Dukung+ | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 80,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| SK.02 | Terseleenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif | | | | | | | | | | | |
| SK.03 | Terseleenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi | | | | | | | | | | | |
| IKSK.03.1 | Persentase capaian pemantauan SDKP di WPP NRI
Data Dukung1 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+ | % | Maximize | Rata-rata | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.03.2 | Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP
Data Dukung1 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+ | Indeks | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 82,00 | 40,00 | 48,33 | 120,00 | 40,00 | 48,33 | 120,00 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.03.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
Data Dukung1 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+ | Indeks | Maximize | Rata-rata | 82,00 | 82,00 | 95,20 | 116,10 | 164,00 | 190,55 | 116,19 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.03.4 | Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
Data Dukung1 ✓ [5] Data Dukung2 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+
Data Dukung3 [5] Data Dukung4 [5] | % | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | 120,00 | 14-Jul-2025 14:16 |
| SK.04 | Terseleenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif | | | | | | | | | | | |
| IKSK.04.1 | Indeks operasi kapal pengawas
Tambah Data Dukung+ | Indeks | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 92,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.04.2 | Indeks operasi pesawat patroli
Data Dukung1 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+
Data Dukung2 [5] | Indeks | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 95,00 | 91,00 | 98,24 | 107,96 | 91,00 | 98,24 | 107,96 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.04.3 | Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
Data Dukung1 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+
Data Dukung2 [5] | % | Maximize | Rata-rata | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.04.4 | Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas
Tambah Data Dukung+ | Indeks | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 60,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| SK.05 | Terseleenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | |
| IKSK.05.2 | Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
Tambah Data Dukung+ | Indeks | Maximize | Rata-rata | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.05.3 | Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP
Data Dukung1 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+
Data Dukung2 [5] | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 82,00 | 35,00 | 36,60 | 104,71 | 35,00 | 36,65 | 104,71 | 14-Jul-2025 14:16 |
| SK.06 | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan | | | | | | | | | | | |
| IKSK.06.1 | Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA
Tambah Data Dukung+ | % | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 95,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.2 | Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA
Tambah Data Dukung+
Data Dukung1 [5] Data Dukung2 [5] | Indeks | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 81,00 | 74,00 | 85,37 | 110,36 | 74,00 | 85,37 | 110,36 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.3 | Nilai PM SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP
Tambah Data Dukung+ | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 66,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.4 | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP
Tambah Data Dukung+
Data Dukung1 [5] | % | Maximize | Rata-rata | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.5 | Nilai Pengawasan Keabsahan Internal unit Kerja lingkup Setditjen PSDKP
Tambah Data Dukung+ | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 80,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.6 | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
Data Dukung1 ✓ [5]
Tambah Data Dukung+
Data Dukung2 [5] | % | Maximize | Rata-rata | 95,00 | 95,00 | 100,00 | 105,26 | 190,00 | 155,00 | 102,63 | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.7 | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA
Tambah Data Dukung+ | Inovasi | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 1,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.8 | Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA
Tambah Data Dukung+ | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 80,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| IKSK.06.9 | Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
Tambah Data Dukung+ | Nilai | Maximize | Nilai Posisi Akhir | 70,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14-Jul-2025 14:16 |
| Tutup | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 2. Memo penyampaian capaian kinerja Katimja PSIIK periode triwulan II 2025 (update)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM

NOMOR: 1474/DJPSPDKP.3/TU.140/VII/2025

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari : Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan
Hal : Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025
Lampiran : -
Tanggal : 4 Juli 2025

Sehubungan dengan hasil pengukuran IKU Triwulan II Tahun 2025 Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan, dapat kami informasikan sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN II		
			TAHUN 2025	TARGET	REALISASI CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	3	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	4	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan informasi intelijen SDKP	82	40	50
3	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	5	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	82	82	95,20

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Direktur Pengendalian Operasi Armada diucapkan terimakasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febrianto Wardhana Utama

Lampiran 3. Perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau pemanfaatan SDKP Triwulan II 2025

Pehitungan CAPAIAN IKU Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI (%)
TRIWULAN II 2025

Formula:

$$X = (x1/x2) \cdot 100\%$$

Keterangan:

x: Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)

x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP

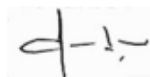
x2: Jumlah WPP NRI

X1 = 11 WPPNRI

X2 = 11 WPPNRI

$$\text{Capaian TW I} = (11/11) \times 100\% = 100\%$$

Jakarta, 4 Juli 2025



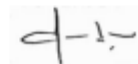
Febrianto W. Utama

Lampiran 4. Perhitungan capaian IKU pemenuhan data dan analisis periode Triwulan II 2025

PERHITUNGAN CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN SISTEM PEMANTAUAN DAN INFORMASI INTELIJEN SDKP
TRIWULAN II 2025

No	Indikator	Bulan						Bobot	Perhitungan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		
1	Analisis Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	40	20
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	20	10
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	20	10
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	0	1	1	1	1	20	8,33
Indeks									48,33

Jakarta, 5 Juli 2024



Febrianto W. Utama

Lampiran 5. Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Operasi Pesawat Patroli periode Triwulan II 2025

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja lingkup
Subdirektorat Operasi Kapal Pengawas Dan Pesawat Patroli
Periode Triwulan II Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Capaian TW II	%
1	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks)	95	91	98,24	107,95

Lampiran 6. Penyampaian capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM
Nomor 1546/PSDKP.3/TU.140/VII/2025

Yth : Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari : Ketua Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Periode TW II Tahun 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Tanggal : 10 Juli 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada Periode Triwulan II Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Herry Mulyono

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

IKU Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan

No.	Indikator Kinerja	Periode Penilaian	Target
1	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	Triwulan	100
2	Inderks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	Tahunan	80
3	Persentase Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	Tahunan	100

Capaian Target dan Realisasi Periode TW I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Capaian TW II	Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	Memenuhi
2	Inderks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	80	-	-	Penilaian dilakukan pada akhir tahun/TW 4
3	Persentase Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100	-	-	Penilaian dilakukan pada akhir tahun/TW 4

Rincian Perhitungan Indeks Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Periode TW II Tahun 2025

No.	Kompenen	Target TW I	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
Total Nilai		100	100	100

PERSENTASE PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN

No.	Indikator Pemenuhan Logistik	PERIODE				Bobot	Maksimal Persentase	Perhitungan	Keterangan/Data Dukung	
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (4/4)	1	2	-	-	30	100%	30	a	BA. BBM Akhir Bulan dan Surat Aju BBM Kapal
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (4/4)	1	2	-	-	20	100%	20	b	Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (4/4)	1	2	-	-	25	100%	25	c	Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor (Scan)
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (4/4)	1	2	-	-	15	100%	15	d	Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor (Scan)
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (4/4)	1	2	-	-	5	100%	5	e	Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor (Scan)
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (4/4)	1	2	-	-	5	100%	5	f	Dokumen Laporan SENIATA API dan AMUNISI
Persentase						100		100		

Ketua Tim Kerja Penyiadaan Logistik Armada Pengawasan


Herry Mulyono

Lampiran 7. Hasil Penilaian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id, SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor	: B.2332/PSDKP.1/OT.710/VII/2025	15 Juli 2025
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	
Hal	: Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025 Lingkup Ditjen. PSDKP	

Yth.

1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
 2. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
- di
Jakarta

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan realisasi atas rencana pengendalian risiko pada Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

BAB II

HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	3	3	100%
	Direktorat POA	21	21	100%
	Direktorat PSP	6	6	100%
	Direktorat PPSDP	10	10	100%
	Direktorat PPSDK	6	6	100%
	Direktorat PP	13	13	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	17	17	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	14	14	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	23	23	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	30	30	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	23	23	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	13	13	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	11	11	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	14	14	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	6	6	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	16	16	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	7	7	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	5	5	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	8	8	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	11	11	100%
Total		257	257	100%

Lampiran 8. Data dukung IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP periode Triwulan II 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.2306/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penyampaian Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2025

Yth. Pejabat (daftar terlampir)

Di tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Triwulan II Tahun 2025 khususnya capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP", berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Maret 2025 (Triwulan IV 2024 – Triwulan I 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 660/ITJ.0/TU.140/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2025, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar **100.00% (tuntas 161 rekomendasi dari 161 rekomendasi)**.
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Ditjen PSDKP disampaikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Data Rekapitulasi Capaian IKU

"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP" Triwulan II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	58	58	100.00	0	0
2	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	1	1	100.00	0	-
4	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
5	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
8	Pangkalan PSDKP Batam	0	0	-	0	-
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	0	0	-	0	-
10	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
12	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Belawan	22	22	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0

